
**“SIMALAKAMA DI LAHAN GAMBUT”
ETNOGRAFI MASYARAKAT
DI KALIMANTAN BARAT DAN SUMATRA SELATAN**

*“SIMALAKAMA IN PEATLAND”
MULTI-SITED ETHNOGRAPHY
IN WEST KALIMANTAN AND SOUTH SUMATRA*

**Rio Heykhal Belvage, I Ngurah Suryawan, Aprinus Salam,
dan Wiwien Widyawati Rahayu**

Pusat Studi Kebudayaan, Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta
rio.belvage@gmail.com, ngurahsuryawan@gmail.com, aprinus@ugm.ac.id,
dan wiwien.fib@ugm.ac.id

Diterima tanggal 4 Januari 2019

Disetujui tanggal 14 Juni 2019

ABSTRACT

This study aimed to understand the conditions of two communities in the frontier regions of West Kalimantan and South Sumatra amidst a great flow of investment and exploitation of natural resources. The development program and the offer of prosperity continuously come until it risks their own lives. Furthermore, the relation between community's history and the environment is gradually ignored. This study was conducted in two locations which represented different community characteristics. First, the community of Dayak Kanayatn in Teluk Bakung village, Sungai Ambawang subdistrict of Kubu Raya district, West Kalimantan, representing local people. Second, transmigrants in Banyu Biru village, Air Sugihan subdistrict, Ogan Komering Ilir district, South Sumatra, representing the immigrant. These two locations represented two characteristics of the community: the local and immigrant community. Both of them are now living in areas of Peatland Hydrological Units (KHG). By using ethnography approach to describe anthropological phenomena in two KHG areas, this study argued that the living space of community in the peatland is increasingly shrunk. If the restoration efforts in the midst of increasingly widespread extractive capitalism is not carefully handled; thus, it is at risk of converting the social system complexity into mere technical development formulas.

Keywords: *ethnography, frontier, exploitation, social change, and peatland.*

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk memahami kondisi masyarakat di kawasan garis depan (*frontier*) Kalimantan Barat dan Sumatra Selatan, di tengah arus kuasa investasi dan eksploitasi sumber daya alam. Pembangunan dan tawaran kemakmuran merangsek terus-menerus hingga mempertaruhkan kehidupan mereka sendiri. Relasi historis masyarakat

dengan lingkungan perlahan tersingkir. Penelitian ini dilakukan di dua lokasi yang menunjukkan karakteristik masyarakat yang berbeda. Pertama, masyarakat Dayak Kanayatn di Desa Teluk Bakung, Kecamatan Sungai Ambawang, Kabupaten Kubu Raya, Kalimantan Barat, yang mewakili masyarakat tempatan. Kedua, transmigran di Desa Banyu Biru, Kecamatan Air Sugihan, Kabupaten Ogan Komering Ilir, Sumatra Selatan. Dua lokasi ini mewakili dua karakteristik masyarakat, yaitu masyarakat lokal dan masyarakat pendatang. Kini keduanya bermukim di kawasan yang oleh negara didefinisikan sebagai Kesatuan Hidrologi Gambut (KHG). Dengan menggunakan pendekatan etnografi untuk memaparkan fenomena antropologis di dua lokasi KHG, penelitian ini berargumentasi bahwa eksistensi masyarakat di kawasan gambut kian terhimpit ruang hidupnya. Upaya-upaya restorasi di tengah kian meluasnya kapitalisme ekstraktif, bila tidak ditangani secara hati-hati, berisiko mengonversi kompleksitas sistem sosial menjadi rumus-rumus teknis pembangunan belaka.

Kata kunci: etnografi, *frontier*, eksploitasi, perubahan sosial, dan kawasan gambut.

A. PENDAHULUAN

Seluk-beluk kehidupan masyarakat kerap jauh lebih kompleks dari apa yang dibayangkan oleh banyak pihak. Karena di satu sisi, masyarakat adalah satuan sosial yang irama hidupnya terus berubah, dan pada sisi yang lain selalu ada bias yang sukar dihindari, yaitu antara posisi seorang pengamat dan pelaku (masyarakat itu sendiri). Pada konteks yang lain, bias ini pula yang dijumpai ketika menyaksikan historisitas berbagai upaya pemakmuran [baca: program pembangunan] yang dilakukan oleh pemangku kepentingan atau pemangku kebijakan, yang pada kenyataannya kerap tidak seirama dengan apa yang menjadi kehendak masyarakat yang dijadikan sebagai “objek” kebijakan.

Dalam buku “*The Will to Improve: Perencanaan, Kekuasaan dan Pembangunan di Indonesia*”, Li (2012) dengan tajam menunjukkan bahwa tantangan yang dihadapi terkait dengan masalah pembangunan selama ini lebih banyak dilatarbelakangi

oleh adanya benturan “kehendak untuk memperbaiki” yang berasal dari pemangku kepentingan, baik itu dari pemerintah, akademisi, LSM, atau juga wali masyarakat. Pada tulisan lain, Li juga mengungkapkan bahwa selama ini daerah pedalaman di Indonesia telah didefinisikan, dibentuk, dibayangkan, dikelola, dikendalikan, dieksploitasi, dan “dibangun” melalui berbagai wacana dan praktik yang berlangsung melalui karya akademik, kebijakan pemerintah, aktivisme nasional dan internasional, dan pemahaman masyarakat awam (Li, 2002: 3).

Jika dicermati, pernyataan Li tersebut berupaya menunjukkan bahwa proses peminggiran selalu berkelindan dengan konteks sejarah, relasi pengetahuan dan kekuasaan. Hingga kini, pemangku kepentingan masih memandang masyarakat sebagai sekelompok orang yang terasing, tertinggal, tradisional, ataupun tidak memiliki pengetahuan yang baik tentang lingkungan. Persepsi semacam ini tidak saja keliru, tetapi juga bisa

berakibat fatal karena mengindikasikan adanya hasrat penaklukan oleh para ahli pembangunan terhadap sistem pengetahuan masyarakat tempatan. Modalitas sosial dan budaya masyarakat tempatan “dipasifkan” sedemikian rupa, sehingga akhirnya harus takluk pada ekspansi ide-ide pemakmuran yang dilegitimasi oleh berbagai peraturan perundang-undangan.

Dalam diskusi antropologi di Indonesia, jauh-jauh hari gagasan senada sebetulnya juga sudah pernah dinyatakan oleh Dove, dalam kumpulan tulisan yang ia sunting, dengan judul “Peranan Kebudayaan Indonesia dalam Modernisasi”. Ia menulis sebagai berikut.

“Di Indonesia, sebagaimana di banyak negara sedang berkembang lainnya, pembangunan diartikan sebagai perubahan yang dikehendaki dan dibutuhkan. Apa saja yang dianggap kuno dan tidak mengalami perubahan dengan sendirinya akan dianggap sebagai keterbelakangan. Secara khusus ini diterapkan pada kebudayaan. Kebudayaan dan gaya hidup tradisional itu juga dianggap sebagai penghalang besar bagi pembangunan sosio-ekonomi. Karena itu, dalam perencanaan pembangunan, salah-satu hal yang diusahakan adalah dengan mengutuk dan mengubah, bahkan menyingkirkan kebudayaan tradisional itu” (Dove 1985: xv).

Dalam konteks pengaturan lahan gambut yang terjadi belakangan ini,

tulisan Pirous yang terbit di kolom Kompas (29 Maret 2018) berjudul “Kerentanan Akibat Larangan Bakar Lahan” memberi kesaksian tentang itu. Ia menceritakan tingginya biaya sosial yang mesti ditanggung oleh masyarakat tempatan, lantaran Instruksi Presiden Nomor 11 Tahun 2015 tentang Peningkatan Pengendalian Kebakaran Hutan dan Lahan. Inpres tersebut menurut Pirous dijadikan landasan dari larangan membakar lahan yang tidak membedakan antara api yang berada di kawasan lahan gambut dan api yang berada di kawasan tanah mineral non-gambut. Larangan yang diterapkan di lahan gambut, yaitu tanah yang dimiliki oleh warga sendiri dan biasa digunakan untuk berladang, telah mengakibatkan tradisi masyarakat peladang berpindah (*swidden agriculture peasant*) di Kecamatan Kendawangan Kabupaten Ketapang Kalimantan Barat terputus, yang selanjutnya mengakibatkan daya subsistensi masyarakat menurun. Mereka yang semula mampu mencukupi kebutuhan dari hasil bumi di ladang sendiri, kini mesti keluar uang untuk mencukupi kebutuhan.

Pendapat lain, seperti Lahajir misalnya, melihat sistem ladang berpindah pada dekade terakhir ini cenderung tidak adaptif lagi. Kondisi ini terjadi karena sistem ladang berpindah tersebut tidak lagi dibingkai oleh kerangka etnoekologi perladangan lokal yang berdasarkan adat, ritual, dan mitos (Lahajir, 2001: 406). Bisa jadi pendapat tersebut tepat, tetapi tidak demikian

dengan yang terjadi di Borneo (Kalimantan). Studi historis di Borneo memperlihatkan bahwa terputusnya siklus ladang berpindah adalah akibat dari masuknya perkebunan karet (*Hevea brasiliensis*) di tahun 1910, yang membuat luas wilayah hutan berkurang, sehingga masyarakat tidak mungkin lagi melakukan sistem ladang berpindah (Semedi, 2012; Kumoro, 2015). Jadi, faktor utama yang menyebabkan sistem ladang berpindah tidak adaptif bukan karena perubahan pada adat, ritual, dan mitos di kalangan masyarakat peladang, melainkan karena diperkenalkannya jenis tanaman baru, yaitu karet. Pada intinya, kenyataan itu membuat produktivitas lahan terus menurun diikuti dengan meningkatnya ketergantungan masyarakat akan pasar.

Dengan kompleksitas persoalan dan tantangan semacam itu, penelitian ini berusaha menarasikan kembali dinamika masyarakat yang bermukim di kawasan gambut. Tujuannya adalah untuk memahami bagaimana kondisi masyarakat di tingkat tapak, yang sesungguhnya kompleks dan kerap kontras jika dibandingkan dengan laporan-laporan yang tertuang dengan rapi dan menarik di atas kertas. Persoalan yang terjadi tidak mudah diselesaikan bila hanya bertumpu pada kebijakan *top-down* (dari atas ke bawah) atau *bottom-up* (dari bawah ke atas) semata.

B. METODE

Penelitian ini bersandar pada data kualitatif dengan menerapkan

pendekatan etnografi terfokus. Spradley (1997) mengatakan bahwa etnografi merupakan pekerjaan mendeskripsikan kebudayaan, dengan tujuan untuk memahami suatu pandangan hidup dari sudut pandang penduduk asli. Namun demikian, dalam perkembangannya, apa yang disebut Spradley sebagai penduduk atau masyarakat asli telah menjadi polemik tersendiri di kalangan ilmuwan dan peneliti lapangan. Adapun Marzali (1997) berpendapat bahwa etnografi berarti tulisan atau laporan tentang suku bangsa, yang ditulis oleh seorang antropolog atas hasil penelitian lapangan.

Sedikit berbeda dengan penjelasan Spradley dan Marzali tersebut, di sini etnografi terfokus secara ringkas diterjemahkan sebagai usaha peneliti memahami liyan (*the other*) dengan tidak berusaha untuk menghadirkan penggambaran total dinamika hidup masyarakat. Karena selain tidak mungkin, penggambaran total tentu membutuhkan interaksi yang intens dalam jangka lama. Jika diterapkan pada tulisan ini, maka etnografi adalah usaha untuk memahami satu isu spesifik, yaitu relasi manusia, alam, dan pasar, dalam pengaturan (*governmentality*) yang dijalankan oleh negara.

Di dalam penelitian ini teknik dan proses pengumpulan data dilakukan dengan beberapa cara. Pertama, observasi sebagai langkah awal untuk mengidentifikasi kondisi lapangan penelitian. Kedua, wawancara mendalam dengan beberapa tokoh

masyarakat dan orang-orang setempat yang paham dan mengalami sendiri segala perubahan yang terjadi di tempat tinggalnya. Dalam istilah lain, penempatan subyek tineliti ini dekat dengan perspektif etnosains, yaitu upaya “meminjam pengetahuan tineliti” untuk menangkap suara dari sudut pandang *emic* (tineliti). Pemilihan informan dilakukan dengan teknik *snowball*, yaitu dengan mengikuti informasi atau petunjuk yang berasal dari informan sebelumnya, untuk menuju ke sumber pengetahuan (informan) selanjutnya. Cara ini merupakan upaya untuk mendekati sudut pandang tineliti. Ketiga, diskusi terfokus bersama perwakilan lembaga-lembaga setempat yang telah lebih dulu mencurahkan perhatian terhadap isu-isu yang terkait dengan tema penelitian dan memahami kondisi lingkungan tempat penelitian ini dijalankan. Diskusi ini mustahil dapat terlaksana tanpa bantuan kawan-kawan Wahli (Wahana Lingkungan Hidup Indonesia) Kalimantan Barat dan Walhi Sumatera Selatan. Keempat, studi kasus. Pada poin ini, kami mencoba mengeksplorasi lebih lanjut peristiwa, aktivitas, atau kehidupan individu dan masyarakat yang terjadi di lokasi penelitian. Ketika menarasikan kembali cerita dari para informan, kami sengaja mengaburkan nama-nama mereka dengan membuat nama samaran. Hal ini dimaksudkan untuk melindungi informan, sekaligus menghindari hal-hal yang tidak diinginkan yang bisa saja muncul dari keterangan yang dituturkan

kepada kami. Kelima, studi pustaka yang dilakukan untuk membantu penulis dalam memahami konteks dan membangun narasi etnografi.

C. HASIL DAN BAHASAN

Tulisan ini didasarkan pada hasil penelitian lapangan pada bulan September hingga Desember 2018, atas dukungan Badan Restorasi Gambut (BRG) dalam kerangka kerja perluasan Riset Aksi 2018. Penelitian dilakukan di dua desa yang terletak di sekitar aliran anak Sungai Kapuas (Kalimantan Barat) dan Sungai Musi (Sumatra Selatan). Keduanya dipilih karena mewakili dua karakteristik masyarakat yang berbeda. Meskipun sama-sama tinggal di wilayah gambut, namun masyarakat di lokasi pertama merupakan masyarakat tempatan, sedangkan di lokasi kedua adalah masyarakat pendatang.

Pada bagian abstrak tulisan ini, sempat disinggung kata *frontier*, sebuah istilah yang dalam definisi Tsing (2005: 28) disebut sebagai:

“..an edge of space and time: a zone of not yet-not yet mapped, not yet regulated. It is a zone of unmapping: even in its planning, a frontier is imagined as unplanned.”

Agaknya persepsi tentang *frontier* inilah yang baik secara sadar maupun tidak sadar melandasi pandangan negara pascakolonial dalam melaksanakan program pemakmuran. Secara ambivalen, hal ini terbukti dengan banyaknya konflik agraria yang terus muncul tak kunjung padam.

Pandangan *terra incognita* (daerah tidak bertuan) semacam ini sebenarnya bukan hal baru. Ia muncul sebagai cermin penasaran dari orang-orang luar terhadap daerah yang belum benar-benar dikenali dan dapat dijangkaunya. Dalam konteks kolonial kita dapat merujuk, misalnya dari uraian Breman (2014: 28), tentang sejarah pengaturan ruang. Breman mengacu pada laporan F. de Haan yang ditulis pada 1912, yang mengungkapkan bahwa berdasarkan catatan tahun 1686 telah ditemukan adanya permukiman oleh penjelajah awal VOC di pelosok negeri. Ia menggambarkan bahwa permukiman tersebut memiliki jumlah penduduk yang sedikit dan hampir selalu terletak di daerah aliran sungai atau sekitarnya.

Sedikit penduduk bukan berarti tidak ada penghuninya. Wilayah belantara yang belum diolah dan dikomodifikasi bukan berarti belum dijamah dan tidak ada pemilikinya. Benar bahwa wilayah itu belum terpetakan, tetapi anggapan itu hanya berlaku bagi “orang luar” yang memandang daerah tersebut, dan oleh karenanya mereka membuat kerja-kerja pemetaan (Ikawati dan Dwi Ratih Setiawati, 2009). Tentu saja itu berbeda dengan pengetahuan penduduk setempat yang memiliki peta kognitif tersendiri mengenai ruang hidupnya, bahwa setiap tempat ada pemilikinya. Perbedaan cara pandang inilah yang kerap luput. Pada akhirnya anggapan tentang tanah tidak bertuan kian membenarkan praktik penaklukan ruang dan mengakibatkan ruang hidup

masyarakat kian hari kian menyempit.

Klaim-klaim penaklukan wilayah itu tentu tidak dapat dilepaskan dari sejarah panjang kebijakan negara kolonial tentang *Domein Verklaring* di masa gubernur kolonial Stamford Raffles (1811-1816). Namun karena telah banyak studi yang menguraikan aspek historis tersebut, alih-alih membahas tentang sejarah praktik penaklukan ruang, tulisan ini ingin menarasikan kembali bagaimana serpihan cerita hidup orang-orang yang dalam praktik teritorialisasi yang terjadi belakangan ini didefinisikan menghuni kawasan hidrologi gambut. Pembahasan ini akan diawali dengan catatan dari Kalimantan Barat, yang dilanjutkan dengan cerita-cerita dari Sumatra Selatan.

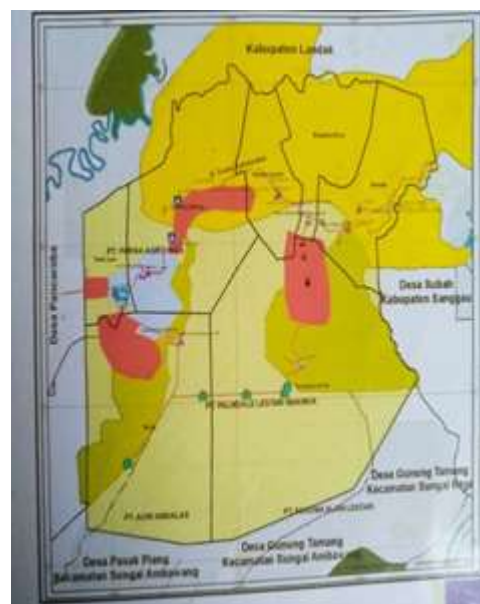
1. Kalimantan Barat

Pada September 2018, kami tinggal di rumah seorang aktivis sekaligus aparatur desa di Dusun Teluk Lais, Desa Teluk Bakung, Kabupaten Kubu Raya. Daerah ini masuk ke dalam kawasan Kesatuan Hidrologi Gambut (KHG) Sungai Ambawang. Dusun tempat kami tinggal, berada di ujung muara Sungai Ambawang. Di antara desa-desa lain, Desa Teluk Bakung memiliki luas kawasan gambut yang paling besar. Di desa ini pula bermukim empat industri ekstraktif, tiga di antaranya perusahaan sawit dan yang satu lagi adalah perusahaan HTI dengan tanaman akasia. Keempat perusahaan itu adalah PT.Kars, KSP (Akasia), PT. Palm, dan PT. Gan.

Mayoritas warga di Desa Teluk Bakung beretnis Dayak Kanayatn, satu dari ratusan subsuku yang mendiami Pulau Kalimantan. Menurut Prawiroadmojo (dalam www.yohanessupriyadi.blogspot.com), nama Kanayatn berasal dari kata “kana” (sana), “yana” (jalan), dan “yani” (sungai). Bila terjemahan ini tepat, maka ia sekaligus menggambarkan betapa dekatnya kosmologi orang Dayak Kanayatn dengan lanskap sungai. Namun ada juga versi lain tentang istilah Kanayatn, seperti yang ditulis oleh Johansen, dalam laporan penelitian yang berjudul “Pengetahuan Masyarakat Dayak Kanayatn terhadap Lingkungannya”. Ia menulis sebagai berikut:

“Dari saksi hidup yang merupakan sumber sastra lisan yang berhasil ditemui, tidak ada orang Dayak tersebut yang mengatakan dirinya ‘Kanayatn’. Dalam penelitian Bernad Sellato yaitu dalam bukunya “*Dragon and Hornbill*” dan juga dalam buku ‘Kalimantan Membangun’ karangan Tjilik Kriwut, tidak juga terdapat nama suku Dayak Kanayatn. Sebutan atau istilah Kanayatn untuk menamakan orang-orang Dayak yang bermukim di Kabupaten Landak dan sekitarnya justru secara tertulis diberikan pertama kali oleh seorang Misionaris Katolik yang bernama Pastor Donatus Dunselman OFM Cap dalam bukunya yang berjudul ‘*Budrage [Bijdrage, red.] tot de Kennis van de Taal En Adat der Kendajan*

Dajaks Van West-Borneo’ (1979). Di sini dia menyebutkan bahwa ‘Kanayatn’ sama dengan orang ‘bukit’” (Johansen, 2003: 17-18).



Gambar 1. Peta Desa Teluk Bakung, Sungai Ambawang.
Sumber: dok. Rio Belvage.

Peta di atas menunjukkan bahwa Desa Teluk Bakung berada di ujung Kabupaten Kubu Raya, yang meski berbeda secara administratif dengan wilayah kabupaten tetangga, namun memiliki corak budaya yang sama. Mayoritas masyarakatnya adalah masyarakat beretnis Dayak Kanayatn, yang secara lebih spesifik, disebut Dayak Ahe’ demikian warga setempat menjuluki dirinya merujuk pada “bahasa ibu” di sana. Karena desa ini memiliki wilayah yang luas, para elit desa/wali masyarakat mengusulkan pemekaran desa pada beberapa tahun belakangan ini. Ketika peneliti berbincang dengan Kepala Desa Teluk Bakung, Valentinus Agip, ia

menyatakan:

“Desa ini terlalu besar. Lima kali luas kota Pontianak. Makanya saya setuju kalau dimekarkan, supaya pembangunan bisa lebih cepat dilaksanakan dan merata.” (Wawancara Valentinus Agip, Desa Teluk Bakung, 19 September 2018).

Di Desa Teluk Bakung dan juga di desa-desa sekitar di Kecamatan Sungai Ambawang, sungai adalah jalur transportasi utama pada masa lalu. Sungai menghubungkan satu tempat dengan tempat lain, serta menjadi urat nadi antara geliat kehidupan kota dan pedalaman. Di Dusun Teluk Lais sendiri, tempat kami menginap, mulanya hanyalah hamparan ladang tanpa pemukiman. Pemilik ladang itu adalah orang-orang yang berasal dari daerah sekitar, seperti Korek, Kuala Ambawang, Lingga, Cabang Kiri, ataupun daerah-daerah lain di sekitar itu. Ketika sungai masih menjadi jalur transportasi utama, mereka membangun gubuk-gubuk kecil di sepanjang sungai sebagai tempat pemberhentian untuk menuju ladang. Lama-kelamaan gubuk-gubuk yang semula adalah tempat pemberhentian, kemudian berubah menjadi tempat hunian.

Pada tahun 1966, misalnya, Nyirum Oreg, seorang *Pasirah* (pemangku adat di tingkat desa) bercerita bahwa dahulu dinding rumah-rumah yang berada di tepi sungai terbuat dari kulit kayu dan atapnya dari rumbia. Warga satu per satu mulai datang dan kemudian membangun rumah

panggung menghadap ke anak-anak sungai Kapuas.



Gambar 2. Sisa-sisa rumah yang berada di pinggir Sungai Ambawang, Dusun Teluk Lais.

Sumber : dok. I Ngurah Suryawan.

1.1 Budaya Jalan Trans-Kalimantan

Pola permukiman warga lambat-laun bergeser ketika pemerintah mulai membangun Jalan Trans-Kalimantan di penghujung rezim Orde Baru. Pembukaan jalan darat yang menjadi urat nadi baru bagi jalur ekonomi Pulau Kalimantan ini, sekaligus mengubah pola konsentrasi ruang hidup masyarakat yang tinggal di sepanjang sungai di Kecamatan Sungai Ambawang. Rumah-rumah yang semula didirikan menghadap ke aliran sungai dan membelakangi ladang, pada tahun 90-an berubah posisi berbalik membelakangi sungai dan menghadap ke “jalan baru”.

Dampak pembangunan Jalan Trans Kalimantan ini, selain mengubah pola tata ruang warga setempat, yang paling tampak adalah membuat mobilitas orang dan barang menjadi semakin cepat. Dulu warga Dusun Teluk Lais yang akan ke kota harus menghabiskan waktu satu hari penuh, bahkan hingga

dua hari satu malam, karena harus menginap di satu pemberhentian sungai. Namun kini mereka hanya memerlukan waktu 60 menit untuk sampai ke kota. Jalan Trans-Kalimantan tidak hanya menghubungkan antara desa dengan kota, tapi juga antar dua negara, Indonesia dan perbatasan Malaysia. Setiap menjelang malam hingga terbitnya pagi, jalanan ini tidak pernah sepi dari kendaraan. Bus-bus besar yang ditumpangi manusia hilir mudik di depan rumah, mengantar orang dari Indonesia menuju Malaysia dan demikian pula sebaliknya. Truk pengangkut sawit, truk tangki minyak, dan sepeda motor melintas di satu jalan yang sama.

Dari hasil pengamatan dan temuan kami tentang dampak pembangunan Jalan Trans-Kalimantan di Desa Teluk Bakung, dan mungkin juga terjadi di seluruh daerah yang dilalui oleh jalan darat baru ini, adalah sebagai berikut:

- a) peradaban sungai mulai ditinggalkan dan beralih ke peradaban darat,
- b) tingkat konsumsi kebutuhan pokok dan sekunder meningkat,
- c) daya subsistensi menurun oleh penetrasi ekonomi pasar,
- d) pergeseran mata pencaharian,
- e) tingkat kecelakaan lalu lintas tinggi,
- f) masuknya industri ekstraktif sawit dan HTI,
- g) pengeringan lahan basah (gambut) akibat kanalisasi perusahaan,
- h) meningkatnya intensitas banjir ketika musim hujan dan kebakaran saat kemarau,
- i) kerap terjadi konflik yang melibatkan masyarakat, pengusaha dan aparat.

1.2 Konflik Agraria

"Daripada kita mati kelaparan mending perang sekali," kalimat itu terucap dengan nada ringan dan spontan dari salah satu warga saat suatu kali ia bercerita tentang konflik yang pernah terjadi di dusun tetangga. Konflik itu dipicu oleh pengalaman salah satu warga, yakni seorang kepala dusun, yang berurusan dengan hukum. Ia ditangkap aparat karena dilaporkan oleh perusahaan lantaran melakukan penghadangan kendaraan milik perusahaan yang melintas. Namun aksi penghadangan itu juga bukannya tanpa alasan. Cerita bermula saat si kepala dusun itu menuntut hak bagi hasil yang dahulu pernah dijanjikan oleh perusahaan kelapa sawit yang beroperasi di daerahnya.

Menurut cerita warga yang tinggal di dusun itu, saat perusahaan kelapa sawit itu masuk atau beroperasi sekitar tahun 2011-2013, mereka beroleh konsesi seluas 20.000 hektar. Izin konsesi itu meliputi permukiman 3000-an warga yang menghuni empat dusun, yakni Dusun Lintang Batang, Dusun Loncek, Dusun Bawas Lestari dan Dusun Re'es. Dari lahan seluas itu, yang dapat dioptimalkan oleh perusahaan hanya sekitar separuhnya, yakni 10.000 hektar.

Di antara periode tersebut, ada program pembuatan sertifikat massal dari pemerintah. Sebagian dari wilayah yang telah beroleh konsesi tersebut selanjutnya diplot oleh kelompok tani dan diajukan ke pemerintah untuk disertifikatkan. Beberapa orang di

antara mereka sebenarnya tahu bahwa lokasi yang hendak diajukan untuk disertifikatkan itu merupakan wilayah yang sudah beroleh konsesi. Salah satu kelompok tani yang mengajukan lahan untuk disertifikatkan adalah kelompok tani di mana si kepala dusun menjadi anggotanya. “Jadi secara fisik lahan itu dimiliki oleh perusahaan, tapi secara administrasi dimiliki oleh petani,” kata warga.

Karena tahu status lahan sebelumnya telah dimiliki oleh perusahaan, maka sebagian petani menyerahkan sertifikat yang telah didapatkannya. Namun tidak demikian dengan kelompok tani si kepala dusun. Pihak perusahaan lalu mencoba bernegosiasi, dengan cara mengajak mereka bekerja sama dalam mengelola hasil dari penjualan kelapa sawit. Tawaran kerja sama tersebut didasari pola inti-plasma. Skemanya adalah 70% milik perusahaan (inti) dan 30% milik petani (plasma), dengan kompensasi ganti rugi 300 ribu/hektar. Selain itu, perusahaan berjanji apabila tanaman telah berusia di atas 5 tahun dan dapat dipanen, maka hasilnya akan dibagi sesuai perhitungan perjanjian inti-plasma. Mendapat tawaran semacam itu, akhirnya kepala dusun bersama anggota kelompok taninya bersedia untuk menyerahkan lahan mereka. Waktu itu, lahan yang diserahkan seluas sekitar 300 hektar, sebagian telah bersertifikat dan sebagian lagi berstatus lahan dengan Surat Keterangan Tanah (SKT).

Setelah berlalunya waktu, 5 tahun kemudian, warga yang dahulu pernah dijanjikan oleh pihak perusahaan akan mendapatkan pembagian dari hasil penjualan sawit ternyata tak kunjung menerimanya. Padahal di sisi lain, setelah 5 tahun berlalu, warga terus dipertontonkan pemandangan berupa kendaraan perusahaan yang keluar masuk wilayahnya dengan mengangkut hasil panen sawit melintasi rumah mereka. Hal ini membuat sebagian warga jengkel. Akhirnya suatu hari si kepala dusun bersama kelompoknya menanyakan masalah itu kepada perusahaan. Akan tetapi jawaban yang diperoleh dari perusahaan, katanya lahan inti-plasma belum bisa dipanen. Selama ini yang dipanen itu adalah lahan yang telah beroleh konsesi milik perusahaan sendiri. Keterangan tersebut rupanya tak cukup memuaskan bagi warga yang setiap hari dipertontonkan hasil panen kelapa sawit.

Suatu hari di tahun 2017, karena akumulasi kejengkelan yang sudah memuncak, truk perusahaan yang melintas di depan rumah dihadang oleh kepala dusun. Aksi penghadangan yang dilaporkan oleh pihak perusahaan ke kepolisian membuat kepala dusun mesti berhadapan dengan aparat kepolisian. Karena peristiwa itu, ia bahkan sempat ditahan oleh pihak kepolisian selama berbulan-bulan. Ketika kasus tersebut disidangkan di pengadilan, kelompok tani sang kepala dusun menuntut pihak perusahaan untuk melakukan pengembalian lahan yang dulu pernah mereka berikan,

seluas 300 hektar, ditambah ganti rugi uang sejumlah 50 milyar rupiah. Di luar dugaan, ternyata pengadilan memenangkan tuntutan tersebut. Kepala dusun dan kelompok taninya berhak mendapat pengembalian lahan seluas 300 hektar serta uang ganti rugi 5 milyar. Atas kemenangan itu, pihak pengadilan memberi waktu dua minggu bagi perusahaan dan koperasi untuk melakukan banding. Jika tidak melakukannya, maka kepala dusun dan kelompok taninya berhak untuk mendapat ganti rugi pengembalian lahan dan sejumlah uang sebagaimana putusan pengadilan.



Gambar 3. Aliran sungai di belakang permukiman warga Dusun Teluk Lais yang kini mulai ditinggalkan.

Sumber. dok. Rio Belvage.

Selang beberapa hari sebelum tenggat waktu habis, tiba-tiba pihak perusahaan dan koperasi mengajukan banding ke tingkat provinsi. Akhirnya, ganti rugi pun tak kunjung diterima dan hingga saat penelitian ini dilakukan, proses hukum masih berjalan. Sejak itu si kepala dusun memang sudah dibebaskan dari ruang tahanan. Namun status lahan sengketa seluas 300 hektar itu hingga kini masih disegel, tidak

dapat diakses oleh kedua belah pihak. Mangkrak, dengan kondisi buah yang membusuk di tempat, demikian kata warga setempat.

Kompleksitas konflik pemanfaatan lahan antara masyarakat dan pihak perusahaan, yang telah digambarkan di bagian sebelumnya, menjadi kian bertambah pelik karena berkelindan dengan garis kekerabatan. Berdasarkan keterangan warga, ada seorang warga di dusun yang menjadi bagian dari kelompok taninya si kepala dusun yang juga terlibat dalam penuntutan ganti rugi kepada pihak perusahaan. Padahal anaknya bekerja di perusahaan yang melakukan tuntutan balik terhadap aksi warga, termasuk bapaknya. Dalam garis kekerabatan, hubungan mereka adalah antara bapak dan anak. Namun persoalan sengketa lahan yang diselesaikan dengan jalan hukum formal itu membuat mereka harus saling berhadapan. Fakta ini menunjukkan betapa panjang konsekuensi tumpang tindih tata kelola dan pemanfaatan sumber agraria di tingkat tapak.

2. Sumatra Selatan

Ada perbedaan yang cukup mencolok terkait fungsi sungai sebagai bagian dari kosmologi hidup masyarakat, di Kecamatan Air Sugihan (Sumatra Selatan) dan di Kecamatan Sungai Ambawang (Kalimantan Barat). Sebagaimana diterangkan pada ulasan sebelumnya, di Sungai Ambawang, fungsi anak Sungai Kapuas sebagai jalur transportasi sudah mulai

ditinggalkan sejak selesainya pembangunan Jalan Trans-Kalimantan. Tidak demikian di Sumatra Selatan ketika kami tiba di sana. Julukan “Venesia dari Timur” yang pernah dilekatkan semasa kolonial ke daerah ini memang telah pudar, lantaran kondisi kota di atas air itu tidak lagi seperti dahulu, terlebih di jantung Sumatra Selatan, yakni Kota Palembang. Namun hingga saat ini, akses menuju daerah perdesaan masih sangat bergantung pada keberadaan transportasi jalur sungai.

Kamis siang itu, tepatnya pada 11 Oktober 2018, kami berada di dermaga Benteng Kuto Besak, di samping Jembatan Ampera. Kami, Tim Peneliti dari Pusat Studi Kebudayaan Universitas Gadjah Mada, menunggu perahu berangkat menuju jalur bernomor 27, dengan tujuan Desa Banyu Biru, Kecamatan Air Sugihan, Kabupaten Ogan Komering Ilir.



Gambar 4. Dermaga yang menjadi pusat lalu lintas transportasi sungai di Sungai Musi menjadi penghubung antara kota dengan desa.
Sumber: dok. I Ngruh Suryawan.

2.1 Bergantung Pada Sungai

Jalur sungai adalah alternatif jalan yang paling memungkinkan untuk membawa kami ke tempat yang akan kami tuju, yaitu Desa Banyu Biru, Kecamatan Air Sugihan. Sebab, belum tersedia fasilitas angkutan umum yang menghubungkan Kota Palembang dengan Banyu Biru melalui jalan darat. Angkutan umum hanya tersedia untuk jalur sungai, sedangkan jalur darat hanya dapat dilalui di musim kemarau dan dilewati kendaraan pribadi saja. Ketika masuk musim hujan pada bulan-bulan seperti ini (Oktober), akan sulit menggunakan jalur jalan darat karena kondisi jalan menuju ke daerah yang kami tuju masih berupa tanah liat yang licin, penuh lumpur, dan sukar dilalui. Demikian keterangan yang kami peroleh dari orang-orang yang kami temui di Palembang.

“Terpencilnya” hubungan antara desa dan kota di Palembang ini terlihat, misalnya dari keterangan setiap sopir kendaraan beraplikasi *online* yang kami tanyai. Sebagian besar dari mereka mengaku belum pernah menjamah tempat yang akan kami tuju, padahal jaraknya hanya berselang dua jam dari kota jika menggunakan jalur sungai. Barangkali itulah yang menyebabkan mobilitas orang desa yang menuju ke kota lebih tinggi dibandingkan orang kota yang ke desa.

Siang itu kami sudah berada di atas angkutan umum perahu, bersiap-siap hendak menuju Desa Banyu Biru. Di dalam *speed boat* (perahu motor cepat) yang terasa gerah di tepi Sungai Musi,

kami melihat jauh ke pinggiran sungai. Terdengar anak-anak kecil berteriak dan tampak kegirangan melihat alat transportasi baru yang disediakan di kota. Kereta LRT melintas di ketinggian. "Kereta, kereta!" teriak anak-anak itu. Jalur kereta itu memang baru saja dibangun di Kota Palembang untuk memudahkan mobilitas orang-orang kota. Satu pemandangan yang terasa kontras bila dibandingkan dengan kelangsungan pembangunan infrastruktur sungai untuk orang-orang desa di kabupaten sekitar.

Anak-anak kecil yang kegirangan saat melihat kereta dari kejauhan itu, bersama para penumpang lain, termasuk kami, sudah berjam-jam menunggu di bawah panas udara siang. Namun perahu tak kunjung berangkat karena masih menunggu kursi terisi penuh. Tentu lain dengan kondisi kereta ber-AC, dengan biaya angkutan yang juga jauh lebih terjangkau bila dibandingkan dengan ongkos *speed boat*. Dengan uang sepuluh ribu, kereta itu mengantar penumpang hingga ke tempat tujuan. Sementara dengan perahu, para penumpang perlu merogoh kocek setidaknya 90 ribu rupiah satu kali jalan, hanya agar mereka bisa sampai ke tempat yang dituju.

Siang itu, jadwal perahu yang kami tumpangi mestinya berangkat pukul 13.00 WIB, namun baru mulai melaju pukul 14.00 WIB. Jadwal molor hingga satu jam karena si sopir perahu menunggu kursi dipenuhi oleh

penumpang. Dalam satu hari, hanya ada satu buah perahu yang menuju ke jalur bernomor 27, tempat yang akan kami tuju. Jadwalnya pukul 12.00 WIB dari Kota Palembang ke desa dan pukul 06.00 WIB dari desa ke Palembang. Si pemilik perahu sendiri berasal dari desa dan tinggal di desa. Ia memiliki hubungan kekerabatan dengan keluarga besar pemilik perahu atau "penguasa jalur sungai", demikian salah satu warga di Banyu Biru menyebut pemilik perahu.

Perahu yang baru berangkat melintas di bawah Jembatan Ampera, membawa kami mengarungi anak Sungai Musi yang berkelok dan bercabang. Semakin masuk ke dalam, warna air sungai semakin keruh kecokelatan. Di tengah perjalanan, sesekali kami berpapasan dengan perahu tongkang besar yang mengangkut berton-ton kayu akasia. Katanya, kayu-kayu ini didatangkan dari luar daerah untuk diolah di pabrik kertas besar, OKI Pulp and Paper.

Kami tiba di dermaga Desa Nusakarta/Gading pukul 16.00 WIB. Setibanya di sana, kami dijemput dengan menggunakan sepeda motor oleh anak kepala desa dan satu orang dari Kaur Pemerintahan Desa Banyu Biru. Kami pun langsung diantarnya ke rumah Kepala Desa, yang letaknya bersebelahan dengan Desa Gading. Dalam perjalanan, motor yang kami tumpangi melintasi jalan alternatif yang membelah kebun sawit milik warga. Kondisi jalannya licin dan berlumpur. Saat itu jalan penghubung antardesa

sedang dalam proses pembangunan sehingga tidak bisa dilintasi.

2.2 Asal-usul Permukiman Buatan



Gambar 5. Daerah Desa Banyu Biru dan desa-desa transmigrasi di Kecamatan Air Sugihan membentuk garis arsiran jika dilihat dari atas.

Sumber: Arsip Pak Polong, Palembang, Oktober 2018.

Sebagian besar permukiman di Kecamatan Sungai Sugihan adalah desa-desa buatan yang dibangun tahun 80-an. Saat itu pemerintah mendatangkan orang-orang dari Pulau Jawa untuk mengolah “tanah-tanah kosong” (lahan gambut) yang dikelilingi anak Sungai Musi. Daerah yang kini dijumpai sebagai permukiman itu, mulanya adalah hutan. Asnan pernah menyampaikan tentang sungai yang disebut dengan batang, seperti berikut ini.

“Sebagaimana yang lazim dipahami penduduk Sumatra, sungai diidentikkan dengan pohon/pokok kayu [...], sungai disebut sebagai batang.” (2016: 23)

Demikian pula penduduk di pemukiman buatan menyebut sungai seperti orang setempat mengenalinya.

Salah satu orang Palembang yang menghuni daerah ini bercerita bahwa dulu ia adalah salah satu dari 20 orang yang dipekerjakan oleh PT. Sakna Nusantara (berkantor pusat di Jakarta) untuk melakukan pemetaan dan membuka kawasan yang saat itu masih berupa hutan. Ia bersama rombongan datang ke wilayah ini di tahun 1978. Waktu itu pendatang dari Pulau Jawa belum tiba di daerah ini. Barulah kemudian, pada tahun 1982, para transmigran atau “orang-orang trans” dari Jawa didatangkan ke sini. Sebelumnya, daerah yang kini dikenal dengan Banyu Biru ini dijuluki “Petala Bumi”. Nama tersebut diambil dari nama sebuah perusahaan kayu yang pada saat itu beroperasi di daerah ini. Kemudian oleh seorang kyai dari Jawa Barat, nama itu diganti menjadi “Banyu Biru”, setelah rombongan “orang-orang trans” dari Jawa tiba di daerah ini. Katanya, nama tersebut terinspirasi dari nama desa yang sama dengan yang ada di Jawa. Pada saat itu kepala desanya bernama Hanopo.

Rombongan pertama yang didatangkan dari Jawa sejumlah 132 KK. Mereka mengisi petak-petak yang membentuk garis balok memanjang di sepanjang tepi sungai. Kemudian menyusul rombongan berikutnya dengan jumlah yang sama. Mulanya penyediaan lahan hanya diperuntukkan khusus bagi transmigran yang berasal dari Jawa. Orang asli Palembang yang bercerita kepada kami, misalnya, bisa sampai memiliki lahan di sini karena mengganti rugi lahan milik “orang-

orang trans” yang ditinggalkan. Dahulu tidak semua warga transmigran dari Jawa yang pindah ke sini betah menghuni tempat barunya. Sebagian dari mereka ada yang tidak kerasan dan memilih untuk pulang.



Gambar 6. Penciptaan jalur-jalur permukiman para transmigran membentang sepanjang Sungai Musi.

Sumber : dok. I Ngurah Suryawan.

Pada periode pertama kedatangan “orang trans”, pemerintah menanggung kebutuhan hidup mereka dengan memberikan bantuan sembako selama 20 bulan, lalu diperpanjang hingga 6 bulan. Saat bantuan berhenti, mereka harus beradaptasi dengan kondisi alam yang berbeda dengan kondisi di Jawa. Pada masa-masa awal itu, tidak ada dari mereka yang mengolah tanah (bertani), sebab jenis tanah di sini berbeda dengan kampung halaman mereka di Jawa. Di tempat baru ini tanahnya adalah tanah gambut, dengan rawa yang ada di mana-mana. Karena tidak memiliki pengalaman bercocok tanam di lahan gambut, banyak warga yang kemudian memilih untuk kerja *logging*/kerja kayu/kerja balok, sejak tidak lagi mendapatkan bantuan dari pemerintah. Mereka menebang pohon-pohon di hutan yang ada di dekat tempat tinggal

mereka, bahkan ada yang sampai kerja balok jauh dari tempat tinggal.

Transisi pola mata pencarian ini kemudian beralih saat ketersediaan kayu di hutan sudah mulai habis. Banyak warga desa yang kemudian merantau ke Pulau Bangka untuk bekerja di lokasi penambangan timah. Sebagian dari mereka ada juga yang bekerja di perkebunan-perkebunan kelapa sawit dan karet di luar daerah. Para perantau inilah yang kemudian membawa atau memperkenalkan tradisi berkebun karet dan kelapa sawit. “Orang-orang trans” dari Jawa ini mendapatkan keterampilan baru di “perantauan kedua”.

Ketika mereka pulang ke kampung halaman di Banyu Biru, satu per satu mulai mencoba untuk mempraktikkan keterampilan berkebun yang didapat dari perantauan. Di luar dugaan, hasil berkebun itu ternyata cukup digunakan untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari. Sejak saat itu mereka bisa hidup di tanah sendiri, di tempat tinggal barunya. Sejak itu pula tradisi merantau di kalangan “orang-orang trans” mulai berkurang. Kini nyaris semua warga memiliki kebun kelapa sawit dan karet sendiri, selain tanaman padi, buah-buahan, dan sarang walet sebagai sumber ekonomi baru.

2.3 Krisis Air

Satu dari sedikit orang Palembang yang pertama kali tiba dan ikut membuka lahan di daerah ini bercerita tentang perubahan kondisi sungai. Menurutnya, di masa awal ia datang ke

situ, air sungai yang menghubungkan desa ini dengan sungai besar Musi hingga menuju ke kota, warnanya belum sekeruh seperti sekarang. Dulu warnanya masih merah jernih, khas jenis warna air di wilayah tanah bergambut. Sungainya pun belum selebar seperti sekarang. Aliran Sungai Musi yang bercabang-cabang itu dilebarkan, supaya perahu berukuran besar bisa masuk ke daerah ini.

Dahulu kebutuhan air warga dapat tercukupi dari pepohonan yang masih banyak tumbuh di hutan, berbeda dengan sekarang. Dahulu, bila tiba musim kemarau, biasanya ada orang yang menjual air yang berasal dari Sungai Musi. Saat mulai masuk PT. Akasia dan terjadi kebakaran besar berkali-kali di hutan yang tidak jauh dari permukiman para transmigran, kondisi air mulai berubah. Perubahan ini semakin dirasakan oleh warga setelah perusahaan melakukan kanalisasi.

Warga yang semula menggantung-kan kebutuhan air sehari-hari dari hutan, kemudian mesti mengandalkan air hujan untuk kebutuhan air minum. Sekitar dua tahun terakhir, warga mulai diingatkan oleh pemerintah setempat agar tidak mengonsumsi air hujan, karena katanya udara di sekitar sudah tercemar oleh limbah pabrik, sehingga air yang jatuh dari langit itu tidak layak lagi untuk dikonsumsi. Salah seorang warga di tempat kami mengingap bahkan berkata dengan keheranan, "Masa anak kecil sudah ada yang kena kanker darah?"



Gambar 7. Warna air sungai yang kecokelatan umum dijumpai di daerah jalur-jalur transmigrasi.

Sumber: dok. Rio Belvage.

Kini ketika pemenuhan kebutuhan akan air bersih kian menemui jalan buntu, berlangsung komodifikasi air sebagai jalan keluar. Sebagian warga yang terbilang mampu dalam ekonomi, mesti merogoh kocek untuk membeli air galon isi ulang untuk kebutuhan air minum dengan harga Rp. 10.000/galon. Penjualnya berasal dari desa tetangga. Biasanya para penjual akan berkeliling desa menjajakan air dagangannya. Sementara bagi warga dengan ekonomi yang kurang mampu, mau tak mau menggunakan sumber air dari desa, yakni air yang telah tercemar dan tidak layak untuk dikonsumsi. Kata warga, "Kondisi air di desa saat ini, kalau tiba musim hujan, bisa bikin mati padi di sawah. Untuk cuci muka pun bikin pedas di mata."

D. SIMPULAN

Studi ini menyimpulkan bahwa di Kalimantan Barat, pada masyarakat tempatan, budaya sungai terhempas oleh budaya jalan, dengan dibangunnya Jalan Trans-Kalimantan. Sebaliknya, di Sumatra Selatan, bagi masyarakat pendatang, sungai justru masih menjadi urat nadi utama yang menghubungkan antara desa dengan kota. Namun meski dari dua tempat tersebut didapati perbedaan, keduanya mengalami hal serupa: pengalaman ketercerabutan. Masyarakat pendatang tercerabut dari lingkungan budaya dari tempat tinggal asal, sementara masyarakat tempatan tercerabut dari kebudayaan sungai. Keduanya terpapar transformasi sosial-ekonomi yang pelik lantaran meluasnya kapitalisme ekstraktif. Mereka dituntut untuk bersikap, di tengah ruang gerak yang kian hari kian menciut.

E. REKOMENDASI

Sudah saatnya dampak kapitalisme ekstraktif yang memproduksi ruang marginal menjadi cermin pembelajaran bagi pemangku kepentingan, sebagai pijakan merencanakan rekayasa sosial, agar berbagai rencana pemakmuran tidak terus-menerus berujung memanen buah simalakama.

DAFTAR SUMBER

- Asnan, Gusti. 2016. *Sungai dan Sejarah Sumatera*. Yogyakarta: Ombak.
- Breman, Jan. 2014. *Keuntungan Kolonial dari Kerja Paksa: Sistem Priangan dari Tanam Paksa Kopi di Jawa, 1720-1870*. Jakarta: Yayasan Pustaka Obor Indonesia.
- Dove, Michael R. 1985. *Peranan Kebudayaan Tradisional Indonesia Dalam Modernisasi*. Jakarta: Yayasan Obor Indonesia, hlm: xv-lvi.
- Ikawati, Yuni dan Dwi Ratih Setiawati. 2009. *Survei dan Pemetaan Nusantara*. Badan Koordinasi Survei dan Pemetaan Nasional Bekerjasama Dengan Masyarakat Penulis Ilmu Pengetahuan dan Teknologi.
- Johansen, Poltak. 2003. Pengetahuan Masyarakat Dayak Kanayatn terhadap Lingkungannya. *Laporan Penelitian*. Pontianak: Balai Kajian Sejarah dan Nilai Tradisional Pontianak.
- Kumoro, Nindyo Budi. 2015. Antara Ladang, Tambang dan Kaharingan: Pengaruh Sistem Ekonomi Baru terhadap Praktik Keagamaan di Pedesaan Dayak, Kalimantan Tengah. *Tesis*. Yogyakarta: Program Pascasarjana Jurusan Antropologi Budaya, Fakultas Ilmu Budaya, Universitas Gadjah Mada.
- Lahajir, 2001. *Etnoekologi Perladangan Orang Dayak Tunjung Linggang: Etnografi Lingkungan Hidup di Dataran Tinggi Tunjung*. Yogyakarta: Yayasan Galang.
- Li, Tania Murray. 2002. “Keterpinggiran, Kekuasaan, dan Produksi: Analisis Terhadap

- Transformasi Daerah Pedalaman,” dalam Tania Murray Li (ed.), *Proses Transformasi Daerah Pedalaman di Indonesia*. Jakarta: Yayasan Obor Indonesia, hlm. 3-74.
- Li, Tania Murray. 2012. *The Will to Improve: Perencanaan, Kekuasaan dan Pembangunan di Indonesia*. Tangerang Selatan: Marjin Kiri.
- Marzali, Amri. 1997. “Apakah Etnografi?,” pengantar dalam James P. Spradley, *Metode Etnografi*. Yogyakarta: Tiara Wacanaa Yogya, hlm. xv.
- Membayangkan Dayak Kanaytn, diunduh dari www.yohanesupriyadi.blogspot.com, pada 11 Maret 2019.
- Pirous, Iwan Meulia. 2018. Kerentanan Akibat Larangan Bakar Hutan. *KOMPAS*, 29 Maret.
- Semedi, Pujo. 2012. *Dinamika Ladang. Working Paper*. Yogyakarta: Jurusan Antropologi, Fakultas Ilmu Budaya, Universitas Gadjah Mada.
- Spradley, James P. 1997. *Metode Etnografi*. Yogyakarta: PT.Tiara Wacana.
- Tsing, Anna Lowenhaupt. 2005. *Friction: An Ethnography of Global Connection*. New Jersey: Princeton University Press.
- Wawancara. Valentinus Agip, Teluk Bakung, 19 September 2018.